

Peningkatan Literasi Internet dan Penguatan Sistem Informasi Desa bagi Perangkat Desa Kiarasari

RIZA DARMA PUTRA, DESTI FITRIATI, MUHAMMAD ROSIT,
ELVINA LATHIFA, & AGUNG ARYA

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
E-mail: rizadarmaputra@univpancasila.ac.id | HP: 081241701640

Abstrak Penggunaan internet dalam pembangunan Desa Kiarasari memberi sinyal positif dalam upaya memperkuat desa dan kelebagaanya. Dengan adanya internet ini tentu saja dapat mendorong percepatan pembangunan, namun penggunaan internet saja tidak cukup. Harus ada peningkatan literasi bagi pemangku kepentingan di Desa Kiarasari dalam menggunakan internet. Untuk itu ketersediaan internet tidak hanya sebatas perangkat pendukung dan *website* saja, akan tetapi penguatan sistem informasi bagi perangkat harus berdaya dalam menggunakan internet di desa. Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan literasi internet dan penguatan sistem informasi desa bagi perangkat Desa Kiarasari Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin melihat dan mendalami *brainstorming* dengan mitra terkait melalui rencana modul dan instrumen kegiatan yang meliputi kemampuan literasi media. Hasil penelitian masih menunjukkan adanya gap atau jarak antara fasilitas dan kebijakan penggunaan dengan pemahaman atau literasi bagi para perangkatnya dalam menggunakan internet desa, temuan peneliti menggambarkan pengetahuan mengenai internet aparat desa belum maksimal dengan kontribusinya terhadap pembangunan dan tata kelola desa.

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Internet, Peningkatan Literasi.

Abstract *The use of the development of Kiarasari Village gives a positive signal in an effort to strengthen the village and its institutions. With the internet, of course, it can encourage the acceleration of development, but the use of the internet alone is not enough. There must be an increase in literacy of stakeholders in Kiarasari Village in using the internet. For this reason, the availability of the internet is not only limited to supporting devices and websites, but will strengthen the information system for the village to be empowered use the internet in the village. This study aims to improve internet internet literacy and strengthen village information system for Kiarasari Sukajaya Village officials, Bogor Regency. In this study, researchers used a qualitative approach because they wanted to see and explore brainstorming with partners related to module plans and activity instruments that include media literacy skills. The results of the study still show that there is a gap between facilities and policies on the use of development with understanding or literacy for members in using the village internet.*

Keywords: Village Development, Internet, Literacy Improvement.

CoverAge

Journal of Strategic
Communication

Vol. 13, No. 1, Hal. 26-37
September 2022

Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Pancasila

Accepted July 2, 2022

Revised July 16, 2022

Approved August 24, 2022

PENDAHULUAN

Desa Kiarasari terletak di kaki gunung halimun Kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Desa Kiarasari adalah salah satu desa di Kecamatan Sukajaya yang mempunyai luas wilayah $\pm 1087,5$ Ha. Jumlah penduduk Desa Kiarasari sebanyak 9.060 Jiwa yang terdiri dari 3.063 laki-laki dan 2.736 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.336 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 779 KK dengan persentase 65,38% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Kiarasari.

Secara batas-batas administratif, Desa Kiarasari di sebelah utara berdekatan dengan Desa Kiarapandak, sebelah timur tidak jauh dengan Desa Malasari Kecamatan Nanggung, untuk sebelah selatannya berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Halimun dan sebelah barat Desa Kiarasari tidak begitu jauh dengan Desa Cisarua Kecamatan Sukajaya. Karena dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya secara umum berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 600 dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 23°C s/d 28°C . Desa Kiarasari terdiri dari empat dusun, delapan RW dan 33 (tiga puluh tiga) RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 8 Km^2 dengan waktu tempuh 30 menit dan dari ibukota kabupaten 108 km^2 dengan waktu tempuh 180 menit.

Masuknya internet ke desa Kiarasari seiring dengan pembangunan jaringan telepon yang juga masuk di desa tersebut. Sejak 2014, internet dengan kekuatan 4G telah masuk di desa Kiarasari. Perusahaan *provider* penyedia internet di sana satu-satunya hanyalah Indosat. Sebelumnya juga telah masuk Telkomsel yang juga berencana mengajukan kerjasama dengan desa Kiarasari sebagai satu-satunya perusahaan *provider* yang penyedia layanan internet. Namun karena syarat yang diajukan terlalu berat bagi pemerintahan desa, maka kerjasama itu tidak ditindaklanjuti.

Adanya internet yang dapat diakses warga desa juga menyebabkan desa berbenah. Pemerintah desa mendorong adanya *website* desa agar informasi terkait desa dapat tersaji di *website* tersebut. Sejak tahun 2012, Kiarasari telah memiliki *website* desa hingga sekarang. Sosialisasi ke warga mengenai adanya *web*

desapun segera dilaksanakan. Pemerintah desa menggunakan metode yang masih bersifat konvensional, antara lain poster pemberitahuan dan pembicaraan dari warga ke warga.

Keseriusan penggunaan internet desa ini rupanya mendapat apresiasi dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memberikan penghargaan atas jerih payah pemerintah desa. Dengan domain *desa.id*, Desa Kiarasari makin memantapkan implementasi penggunaan internet dalam pembangunan desa. Pemberian penghargaan *Destika awards* tersebut jelas membuktikan eksistensi pemerintah desa dalam penggunaan internet dalam pembangunan. Riset ini mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana peningkatan literasi Internet dan penggunaan sistem informasi desa di Desa Kiarasari? Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan pengelolaan *website* dan sistem informasi desa yang bermuara pada peningkatan tata kelola desa yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan internet dalam pembangunan desa Kiarasari disatu sisi memberi sinyal positif dalam upaya memperkuat desa dan kelebihannya. Adanya internet tentu saja dapat mendorong percepatan pembangunan. Namun, penggunaan internet desa ini saja tidak cukup. Harus ada peningkatan literasi bagi pemangku kepentingan di desa Kiarasari dalam menggunakan internet. Ketersediaan internet tidak hanya sebatas perangkat pendukung dan *website* saja, tapi melampaui dari itu perangkat dan warga desa harus berdaya dalam menggunakan internet desa.

Perangkat desa di desa Kiarasari terdiri atas aparat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesra, kaur perencanaan, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, sub urusan layanan sosial, sub urusan pertanahan, sub urusan kependudukan kepala dusun dan layanan siaga. Disamping itu, juga terdapat lembaga masyarakat yang terdiri atas badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa, LPM, PKK, Posyandu SAAKi atau satuan adat Kiarasari, KSM dan rukun warga.

Penulis dan tim peneliti dari Universitas Pancasila telah melakukan riset tentang peng-

gunaan internet di Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor pada September 2018 lalu. Hasil penelitian itu menunjukkan penggunaan internet di tingkat aparat desa belum maksimal. Aparat desa dilevel kepala desa hingga kepala urusan hanya menggunakan internet sebatas berkomunikasi dengan sesama perangkat atau dengan pihak luar. Penggunaan *website* desa juga masih sebatas pemberi informasi saja. Kesadaran dan literasi internet belum dikembangkan dalam mendorong tata kelola desa yang baik. Sejumlah fitur dari internet, seperti *browsing* dan *searching* belum dimaksimalkan untuk program pembangunan. Internet juga dapat dikatakan belum menjadi ruang publik dimana semua *stakeholder* dapat berjumpa dalam sebuah ruang yang terbuka dan egaliter. Tentu saja hal ini merupakan ruang dimana internet perlu ditingkatkan literasinya.

Guna memperkuat literasi internet di desa Kiarasari, juga perlu adanya penguatan jaringan internet. Berdasarkan penelusuran penulis, internet desa belum dinikmati oleh seluruh wilayah desa Kiarasari secara merata. Dari sejumlah dusun, praktis hanya dusun Pasir Pari yang internetnya cukup baik. Dusun-dusun lain belum maksimal dan kadang *signal* internet hilang. *Signal* telepon benar-benar hanya dapat digunakan untuk menelepon dan bukan untuk *browsing internet*.

Internet juga mendukung komunikasi maupun pertukaran informasi antardesa yang secara geografis jaraknya sangat jauh. Penyebaran konten desa melalui *web* mampu mengangkat peristiwa dan potensi desa ke ruang publik, bahkan menjadi diskursus baru dalam tata kelola desa, seperti Desa Mandalamekar (Tasikmalaya), Desa Melung (Banyumas), Desa Ciburial (Bandung), Desa Garawastu (Majalengka), Desa Panjalu (Ciamis), Desa Harapan Jaya (Indragiri Hilir), Desa Hanura (Pesawaran), Desa Ciendeur (Cianjur), dan Gampong Cot Baroh (Pidie). Peran media arus utama juga penting. Publikasi desa di sejumlah media nasional, baik cetak, televisi, radio, maupun *online*, semakin melantang isu-isu perdesaan.

Adanya sistem Informasi desa akan memperkuat jaringan kerja antardesa. Desa-desanya memproduksi konten, ada yang berupa

teks, gambar, maupun video yang berisi usulan maupun kritik atas materi yang berkaitan dengan regulasi desa. Konten itu dipublikasikan melalui *web* desa dan disebarluaskan tau-tannya melalui sosial media (Yuliana & Fitriati, 2018).

Selama ini, pelayanan publik di desa masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemerintah desa juga belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data di desa sehingga pelaporan disajikan banyak berdasarkan asumsi semata. Untuk itu, pemerintah desa butuh pengembangan aplikasi pengolahan basis data untuk mendukung sistem tata kelola sumber daya desa dan menjamin sistem informasi yang memberikan ruang pada masyarakat desa untuk terlibat membangun desa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja perlu dibumikan. Belakangan ini cukup marak pengintegrasian teknologi komunikasi menjadi sistem informasi desa. Pemerintah desa dan masyarakat desa sesungguhnya telah diberi ruang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam aktivitas tata kelola sumberdaya dan pelayanan publik di desa. UU No 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 19). Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86).

Setiap desa membutuhkan sistem (aplikasi) yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan desa secara baik dan bersih (*good and clean governance*). Melalui dukungan sistem itu, desa dapat mengelola basis data desa dan menyebarluaskan isu-isu perdesaan. Pemerintah desa dapat mengambil kebijakan yang tepat karena merujuk pada sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) berbasis data yang lengkap dan akurat. Sistem Informasi Desa mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan.

Konten desa menjadi bagian penting dari keberagaman konten internet di Indonesia.

Penyebarluasan konten-konten desa dapat mengurangi isu-isu miring atas dunia perdesaan. Selain itu, desa dapat mempromosikan potensi dan produk unggulan mereka melalui dunia internet. Potensi itu juga terkait dengan potensi wisata, ekonomi sosial dan budaya (Saraswati & Afifi, 2021). Aktivitas infomobilisasi desa akan meningkatkan pengarusutamaan isu-isu perdesaan di ruang publik, menurut Aplikasi Sistem Informasi Desa sebaiknya ber-*platform-free and open source*, sehingga desa dapat mengkostumisasi sumber kode sesuai dengan kebutuhan desa. Aplikasi akan terus berkembang dari masa ke masa. Desa juga bisa memanfaatkan aplikasi secara gratis sehingga mengurangi tindak pembajakan piranti lunak. Akhirnya, tata kelola desa makin transparan dan akuntabel.

Jumlah pengguna Internet di Indonesia yang semakin berkembang dan mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu pengetahuan dan teknologi, namun masyarakat pedesaan sebagian besar belum dapat menikmati fasilitas jaringan internasional itu. Pengguna internet terkonsentrasi di kota-kota besar dengan penetrasi mencapai 57%. Sementara data *e-Marketer* pada 2010 ada 65% dari 66.778 desa di Indonesia belum bisa mengakses fasilitas.

Senada dengan Tapscott, Eric Schmidt dan Jared Cohen dalam karyanya *The New Digital Age, Cakrawala Baru Negara, Bisnis dan Hidup Kita* (2014), juga melihat manusia memasuki ranah pribadi masa depan. Pribadi masa depan ini merupakan kondisi di mana semua orang di muka bumi akan terkoneksi satu sama lain. Lima miliar penduduk bumi siap merambah dunia maya. Diprediksi akan terjadi ledakan konektivitas digital dalam beberapa waktu ke depan. Positifnya, ledakan itu diyakini menghasilkan produktivitas, kesehatan, pendidikan, kualitas hidup dan berjuta kesempatan lain di dunia nyata. Schimdt dan Cohen (2014) meyakini, semua orang akan merasakan hadirnya teknologi digital. Semua orang mulai dari elit hingga kelompok terbawah dalam piramida ekonomi akan menggunakan teknologi informasi sebagai sebuah laku keseharian (Schimdt & Cohen, 2014).

Perkembangan teknologi informasi telah mencapai titik yang sangat maju. Teknologi informasi kini hadir dalam beragam sendi

kehidupan umat manusia. Teknologi informasi menjadi penanda era globalisasi. Kehadiran teknologi informasi komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Hill (2005) dalam bukunya *The Internet in Indonesia's New Democracy* menjelaskan bagaimana kemunculan internet dalam perpolitikan dan demokrasi di Indonesia. Hill begitu menaruh perhatian pada posisi internet di akhir kekuasaan Orde Baru. Setelah itu, Hill kemudian mengamati fenomena reformasi di mana mahasiswa dan kaum intelektual menggunakan internet sebagai wadah menyebar gagasan reformasi dan kritik atas pemerintahan Suharto. Selanjutnya Hill mengemukakan internet dan kelas menengah di Indonesia. Internet digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk pada sektor ekonomi. Tak luput, Hill melihat bagaimana internet juga mengubah *flatfom* media di Indonesia dari media cetak dan televisi menuju media digital.

Studi Hill juga diikuti oleh studi lain yang melihat relasi ICT dan pembangunan. Pengguna media internet yang diprediksi akan menggantikan pengguna surat kabar juga terus meningkat di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tahun 2005 pengguna internet di Indonesia baru mencapai 3,34%. Pada tahun 2014 jumlah pengguna internet mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 35,64%. Artinya dalam kurun waktu sembilan tahun terjadi peningkatan 10 kali lipat.

Bagi negara, internet juga berperan penting sebagai pendorong majunya sistem pemerintahan yaitu sebagai media penyalur aspirasi masyarakat yang efektif dan efisien. Informasi mengenai kebijakan atau program pemerintah juga dapat sampai kepada masyarakat dengan baik melalui situs-situs pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang merata keseluruhan warga negara, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajibannya itu pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mampu mengelola data secara efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan akurat.

Kesenjangan informasi di masyarakat ma-

sih besar dirasakan terutama jika dibandingkan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari masih minimnya akses untuk pemerataan informasi, hal yang paling dirasakan adalah posisi geografi Indonesia yang berbukit, serta masih rendahnya sebagian masyarakat dalam hal pendidikan terutama dalam pengetahuan di bidang teknologi. Negara memiliki kewajiban untuk meratakan infrastruktur komunikasi dan teknologi di Indonesia sesuai dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 2); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32/PER/M. Kominfo/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8); dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Pengguna internet dan teknologi informasi tidak hanya terjadi di kota saja, belakangan internet juga merambah hingga ke pelosok desa. Semakin canggihnya teknologi *mobile* juga cukup memberi pengaruh terhadap penetrasi internet di desa. Penetrasi ini juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah di sektor teknologi informasi yang mendorong lahirnya internet kecamatan. Internet sebagai anak kandung teknologi informasi menjadi penanda penting peradaban desa.

Menurut data dari BPS, mencatat bahwa di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia, provinsi dengan indeks pembangunan tertinggi di 2016 adalah DKI Jakarta dengan perolehan 7,41. Berturut-turut di bawahnya ada Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks sebesar 6,12, dan Kalimantan Timur yang sebesar 5,84. Sementara itu, tiga provinsi dengan indeks pembangunan teknologi informatika dan komunikasi terbawah, ada Sulawesi Barat di level 3,02, Nusa Tenggara Timur dengan angka 2,75, dan Papua yang sebesar 2,41 (www.tirto.id).

Dari data tersebut masih terlihat adanya kesenjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi antara wilayah, khususnya bagian Indonesia Timur. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemkominfo terus mempercepat proyek kabel serat optik nasional atau Palapa Ring. Diharapkan dengan Palapa Ring tersebut indeks TIK diprediksi akan meningkat dan ekosistem digital nasional juga akan makin

konduktif. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang menyebabkan tidak meratanya akses informasi.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sinyal atau jaringan internet yang baik di wilayah perkotaan dan belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Hal tersebut membuat pengguna internet di kota lebih besar daripada pengguna internet di wilayah pedesaan. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesenjangan digital, yaitu jalan menuju akses telekomunikasi, akses ke internet, perolehan pendidikan juga menjelaskan perbedaan akses, dari segi bahasa, akses di wilayah kota lebih bagus daripada desa. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi perbedaan penggunaan internet di kota dan di desa. Akses ke teknologi informasi adalah kunci pembuka pintu untuk dapat masuk ke era ekonomi berbasis pengetahuan. Begitu pula dengan akses internet, masyarakat dapat memperoleh informasi apapun yang mereka butuhkan, yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka (Nasution, 2004:235).

Dalam skala yang lebih besar, kehadiran teknologi dan informasi juga diikuti dengan isu-isu ketimpangan akses. Pada tahun 1970, Tichenor, Donouhe dan Olien (Tichenor et al., 1970) memperkenalkan teori kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap theory*). Teori ini mengasumsikan kelompok penduduk dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memperoleh informasi ini dengan kecepatan yang lebih tinggi dari pada kelompok yang berstatus lebih rendah, sehingga kesenjangan pengetahuan antarkelompok masyarakat tersebut cenderung meningkat dari pada mengurangi (Tichenor et al., 1970:161). Kesenjangan ini tidak menutup sama sekali akses informasi ke kelompok ekonomi rendah, namun proporsi pertumbuhan pengetahuan relatif lebih besar di *segment* masyarakat yang kemampuan ekonominya lebih tinggi. Teori ini juga menekankan kontrol sosial informasi. Kesenjangan sepengetahuan ini juga terjadi sebagai akibat dari proses kontrol sosial (Rossler et al., 2017).

Maka dari itu pemerintah mengatasi masalah kesenjangan digital antara kota dengan desa melalui pembangunan di wilayah desa,

agar desa dapat setara dengan kota. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Desa No. 6 Tahun 2014).

Penjelasan tentang partisipasi warga dalam penyusunan sistem informasi dan mendorong agar ada aplikasi partisipatif di desa. Berdasarkan pemaparan di atas, tim penulis bersama dengan aparat Desa Kiarasari telah membahas rencana kerjasama program peningkatan kapasitas literasi internet desa bagi perangkat desa Kiarasari. Program ini juga dapat terjalin karena sebelum proposal ini ditulis, tim telah melakukan riset kepada internet desa dalam kaitannya dengan pembangunan. Sejumlah temuan penelitian penulis kemudian ditindaklanjuti dengan program kemitraan masyarakat ini.

METODE

Penulis memilih pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Kualitatif dipilih untuk melihat sejauhmana peningkatan literasi perangkat desa dengan penerapan sistem informasi desa. Kualitatif meniscayakan penjelajahan terhadap masalah yang ingin dijawab dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan observasi dan wawancara mendalam, selain itu juga melakukan *braisntorming* dengan Perangkat desa terkait dengan rencana modul dan *instrument* kegiatan yang meliputi Kemampuan literasi media. Wawancara mendalam dengan sejumlah informan, yaitu Nurodin, Kepala Desa Kiarasari di Sekretaris Desa, Kang Ucis, Bapak Rojak Nurhamawan, tokoh masyarakat, dan Kang Wahyu Hidayat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan, maka langkah pertama yang peneliti tempuh adalah memilih dan mempersiapkan instrumen penelitian dengan cara mengevaluasi ulang sistem informasi yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa Kiarasari. Selain itu perlu dilakukan

observasi untuk melihat secara langsung kegiatan yang terjadi. Sehingga proses pengembangan sistem menjadi lebih mudah, karena bidang yang terlibat disini adalah informatika sebagai pengambil data/kebutuhan mitra, serta bidang Ilmu Komunikasi sebagai mediator antara mitra dan orang. Informatika mediator dibutuhkan untuk mempermudah mitra dalam menyampaikan apa yang diinginkan dengan menggunakan bahasa. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti mempelajari hal-hal yang ada di dalam konteks, bagaimana keterlibatan Pemerintah Desa Kiarasari dalam peranan di penelitian ini, dan berupaya memahami serta menafsirkan fenomena yang terjadi melalui kumpulan data, seperti wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

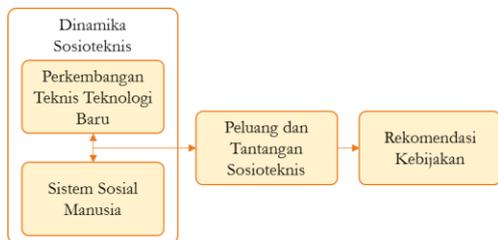
Bedasarkan data olahan wawancara penelitian secara garis besar temuan di lapangan mengenai peningkatan literasi Internet Desa dan penguatan sistem informasi, menunjukkan masih adanya *gap* atau jarak antara fasilitas dan kebijakan penggunaan internet dengan pemahaman atau literasi bagi para perangkatnya dalam menggunakan internet desa. Temuan penelitian menggambarkan pengetahuan internet aparat desa belum maksimal jika dikaitkan dengan kontribusi terhadap pembangunan tata kelola desa.

Tidak diragukan lagi, teknologi telah membari banyak kontribusi positif bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, kita tidak boleh menampikan fakta bahwa terdapat beberapa dampak negatif teknologi terhadap manusia. Fakta tersebut menggambarkan bahwa perkembangan teknologi tidak lagi relevan jika hanya dilihat secara tertutup dari sudut pandang ilmu alam atau ilmu rekayasa. Pemikiran ini sesuai dengan pendapat Guston et al, (2014) yang menyatakan bahwa teknologi tidak dapat dilihat sebagai sebuah artefak pasif. Dengan kata lain, diperlukan perspektif yang lebih luas berupa perspektif dinamika sosioteknis (*socio-technical dynamics*).

Dinamika sosioteknis menyatakan bahwa teknologi dan manusia berinteraksi secara aktif. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Stiegler (1998) yang menyatakan tentang "*original technicity*", bahwa manusia tidak bisa

bebas dari perkembangan teknologi. Dinamika aktif antara teknologi dan manusia terjadi karena perkembangan teknologi terjadi pada ruang lingkup kolektif manusia yang terdiri dari banyak faktor, memiliki rantai kausalitas yang panjang dan kompleks (sosial, budaya, ekonomi, politik, etika), dan menghasilkan efek yang tidak selalu mudah untuk diprediksi (Doom & van de Poel, 2012).

Dinamika sosioteknis ini kemudian melahirkan peluang dan tantangan tertentu. Pada tahap ini, setelah peluang dan tantangan dapat diidentifikasi penyusunan rekomendasi kebijakan yang komperhensif untuk mengoptimalkan peluang dan memitigasi tantangan perkembangan teknologi tersebut (Gambar 1.).



Gambar 1. Desain Konseptual antara Dinamika Sosioteknis Teknologi Baru, Peluang dan Tantangan yang Timbul dan Rekomendasi Kebijakan.

Cepatnya perkembangan teknologi pada era modern membuat pengaruhnya pada manusia semakin terlihat nyata. Sebagai contoh, penggunaan telepon seluler tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah manusia mengonsumsi informasi. Perubahan ini secara tak terhindarkan memengaruhi budaya interaksi antar warga, interaksi antar warga dan pemerintah, hingga interaksi politik dan ekonomi.

Di Desa Kiarasari memiliki sebuah *website* desa yang dapat diakses melalui internet yang memiliki alamat domain internet www.desa-kiarasari.id. Keberadaan *website* desa tersebut memiliki tujuan untuk membangun keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. *Website* desa Kiarasari tersebut aktif sejak 2018. *Website* tersebut merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Desa Kiarasari.

Informasi utama yang ditampilkan dalam *website* tersebut adalah informasi beberapa program oleh Kepala Desa, Pak Nurodin,

sebagai salah satu pelopor dalam pemanfaatan internet yang ada di desanya. Beberapa informasi yang dimuat dalam *website* desa tersebut antara lain adalah mengenai profil desa, program pembangunan desa yang sedang dijalankan dan beberapa artikel yang memuat berita mengenai pembangunan desa. Kiarasari sebagai desa yang menuju desa *cyber*, pola pembaharuan informasi pada *website* desa idealnya dilakukan setiap hari, namun karena keterbatasan sumber daya pengelola sehingga pembaharuan informasi *website* hanya dilakukan setiap tahun sekali, dimana informasi yang diperbaharui adalah pada konten laporan keuangan desa, serta beberapa agenda yang akan dilaksanakan.

Pengelola utama dari keberadaan *website* Desa Kiarasari saat ini hanya terdiri dari satu orang teknisi jaringan dan satu orang pengelola konten informasi, yang dioperasikan langsung oleh Kang Ade sebagai staf desa dan pengelola *website*. Keberadaan *website* desa pun belum begitu maksimal disosialisasikan secara luas kepada masyarakat desa sehingga masih jarang diakses oleh masyarakat Desa Kiarasari sendiri.

Kehadiran teknologi pun mendorong organisasi untuk berubah dan teknologi mengubah hubungan manusia dan organisasi. Orang tidak lagi pergi bekerja, pekerjaan yang akan datang pada orang. Kita sudah lama tidak lagi berbelanja, berbelanja dapat dilakukan dari rumah. Maka, kini kita dapat mengorganisasi masyarakat dengan implementasi pembangunan yang bersifat *“botton up”* dan menekankan *people centered development* yang dibutuhkan pola pendekatan pada aspek sosial budaya masyarakat. Pola pendekatan tersebut dapat membangkitkan partisipasi akar rumput melalui program komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi kesenjangan informasi di tingkat lokal.

Sebelum adanya inovasi dari pihak peneliti mengenai pemanfaatan internet, Pemerintah Desa Kiarasari sudah memiliki inisiatif untuk membuat program mengenai pengenalan desa melalui *website* desa, akan tetapi program pengenalan desa tersebut tidak begitu maksimal dijalankan dikarenakan memang pada saat itu pemanfaatan mengenai internet tidak begitu

meluas. Leuwis (2009) menjelaskan bahwa media komunikasi dapat digunakan untuk intervensi komunikatif dengan selektivitas khalayak. Pemilihan jenis media yang digunakan dan target khalayak akan mempengaruhi ide yang akan dikomunikasikan, strategi komunikasi, dan indentifikasi masalah. Menurut Hesti et al, (2021) seperti dikemukakan bahwa hal tersebut sama dalam pelaksanaan komunikasi terdapat strategi pemasaran yang sistematis, mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Rao dan Schramm, seperti dikemukakan oleh Nasution (2007), dijelaskan bahwa komunikasi pembangunan memiliki kontribusi bagi masyarakat dalam menemukan norma baru, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional dan menciptakan kesetiaan pada nilai-nilai lokal tradisional. Selain itu menurut Fakhri et al., (2022) hadirnya internet menjadikan salah satu aspek perubahan yang berakibat efektivitas pesan dalam merespon pola perubahan program komunikasi pembangunan di tingkat lokal (mikro) lebih mudah untuk direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan dievaluasi pelaksanaannya.

Untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan, maka langkah pertama yang peneliti tempuh adalah menemukan permasalahan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Kiarasari sebagai bentuk rekomendasi pada Pemerintah Desa Kiarasari yang bermanfaat dalam peningkatan literasi internet pada masyarakat Desa, secara garis besar dipisahkan kedalam tiga bagian: (1) Pelatihan literasi internet yang meliputi dari peningkatan pengetahuan literasi internet bagi aparat desa, (2) Pendampingan penggunaan internet desa bagi aparatur desa, (3) Membentuk sistem informasi desa yang digunakan untuk kebutuhan informasi mengenai pengelolaan kebutuhan desa yang sifatnya administratif. Sebagai contoh, seperti kebutuhan yang ikut diusulkan oleh Kang Rojak Nurhamawan, sebagai Tokoh Masyarakat, memberikan usulan fasilitas untuk mempermudah dalam pembuatan surat-menyurat, pendataan warga, pembuatan laporan kegia-

tan dan keuangan, pemberkasan, serta pengarsipan oleh perangkat RT dan RW dan desa. Sistem informasi kependudukan tersebut menyediakan fitur untuk surat ke RT dan RW serta sekretaris desa guna kebutuhan fasilitas untuk mempermudah dalam pembuatan surat-menyurat, pendataan warga, pembuatan laporan kegiatan dan keuangan, pemberkasan, serta pengarsipan oleh perangkat desa.

Pengembangan internet saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai penunjang program kerja instansi pemerintahan. Salah satu proses sistem pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi internet ini adalah dengan adanya *electronic government*. Hartono dan Mulyanto (2010) mengungkapkan bahwa *electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan *Information Communication and Technology* (ICT) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga, masyarakat, organisasi bisnis dan antarl lembaga pemerintahan serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. *E-government* merupakan pemanfaatan media komunikasi berbasis internet oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat yang lebih luas dan mendapatkan umpan balik lebih cepat.

Persoalan Praktis

Hasil wawancara dengan dengan beberapa narasumber, seperti Nurodin (Kepala Desa), Ucis (Sekdes), Bapak Rojak Nurhamawan (tokoh masyarakat), dan Kang Wahyu Hidayat (Ketua BPD), menginformasikan bahwa dari minimnya pemahaman mengenai literasi internet bagi aparat desa menjadi faktor penghambat utama dalam mengimplementasikan pembangunan dan pengembangan *e-gov*, secara khusus dan sarana serta prasarana TIK secara umum. Kepala Desa juga menambahkan bahwa untuk memungkinkan pengembangan dan pembangunan tersebut hanya memungkinkan direalisasikan secara bertahap dan bukan dalam tempo yang singkat, termasuk penyusunan program untuk mendukung implementasi program tersebut.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa secara khusus dan TIK secara umum di Desa Kiarasari dalam pembuatan *master plan*-nya dalam kasus ini penambahan *skill* dan *mindset* aparat dan elemen pemerintahan desa harus diarahkan pada fokus yang sama, yaitu pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa yang berkelanjutan. Ego sektoral perlu dihilangkan untuk mewujudkan sistem informasi desa yang maju dan solid, terintegrasi dan terstruktur. Minimnya penganggaran untuk implementasi sistem informasi desa menunjukkan bahwa *mindset* aparat desa belum menempatkan sistem informasi desa sebagai hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebab, salah satu kekuatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa ke depannya adalah dukungan dari kepala desa untuk menguatkan keterlibatan sistem informasi desa dalam pembangunan dan pengembangan di Desa Kiarasari. Aksi nyata tersebut ditunjukkan dengan instruksi untuk bermitra dengan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, dalam peningkatan literasi internet dan penguatan sistem informasi desa di Desa Kiarasari.

TIK mengintegrasikan sumber daya sistem informasi desa, seperti organisasi, proses dan SDM riwayat inisiasi sistem informasi desa menunjukkan bahwa hambatan utama implementasinya adalah kurangnya kepemimpinan dalam Lembaga TIK. Kemampuan itu diperlukan untuk memanfaatkan TIK sebagai strategi pembangunan, di mana suksesnya implementasi sistem informasi desa ditunjang dengan dukungan manajemen level atas, kualitas staf, kualitas penggunaan, kerjasama antara TIK dan pengguna, pelatihan dan aplikasi yang sesuai kebutuhan. Adapun sistem informasi desa adalah sebuah transformasi besar dan melatih perubahan manajemen. Maka, keberadaan pemimpin yang kompeten dalam memberdayakan organisasi untuk mengatasi hambatan dalam proses dan perubahan organisasi, namun dalam menanggapi pentingnya kepemimpinan dalam implementasi sistem informasi desa, wawancara menunjukkan bahwa di Desa Kiarasari dukungan manajemen di level atas merupakan kunci utama dalam implementasi sistem informasi desa. Komitmen kepala desa sebagai pengembang implementasi tersebut cukup kuat untuk dapat mendorong program

tersebut. Aksi nyata komitmen tersebut sudah dapat dilihat melalui tanggapan terhadap isu pengembangan sistem informasi desa sebagai kuncinya dalam tindak lanjut di pembangunan desa yang lebih serius.

Percepatan realisasi program dari aspek lain juga dapat dipengaruhi oleh pembangunan jaringan internet, secara umum faktor yang dapat mendukung pembangunan jaringan internet adalah kondisi geografis suatu daerah. Wilayah daratan Desa Kiarasari sebagian besar memiliki struktur geografis daerah berbukit. Dalam kondisi ini konfigurasi jaringan internet harus dibuat sedemikian rupa agar dapat meng-cover dan menghubungkan jaringan. Dengan sistem informasi desa, keterhubungan jaringan internet antar informasi luas adalah infrastruktur yang vital untuk dipenuhi. Meski demikian faktor stabilnya jaringan internet menjadi sangat penting dalam menunjang kinerjanya. Selain infrastruktur yang belum memadai, pembangunan jaringan internet juga menjadi masalah tersendiri. Jaringan internet di desa masih terbatas dimana hanya tersedia satu *provider*. Keterbatasan ini menyebabkan minimnya kualitas jaringan internet yang dapat didistribusikan ke tempatnya.

Desain Kebijakan

Interaksi antara perkembangan teknologi dan kebijakan seringkali menunjukkan kontradiksi (Wiener, 2004). Pada banyak kasus, kebijakan tertinggal jauh dari adaptasi perkembangan teknologi. Untuk dapat secara bijak mengatur teknologi, pembuat kebijakan di tingkat desa perlu mendesain kebijakan secara cermat agar peluang dan tantangan sositeknis perkembangan teknologi dapat diidentifikasi. Dengan demikian, kebijakan yang dimuat dapat memastikan masyarakat terlindung dari pengaruh negatif teknologi, tanpa menghambat potensi positif perkembangan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi guna mengidentifikasi permasalahan di desa.

1. Perlunya pemahaman pengetahuan tentang penggunaan internet oleh perangkat dan aparat desa dengan pelatihan literasi internet bagi aparat desa;
2. Perlunya *skill* yang memadai dalam menggunakan internet untuk kepentingan apa-

- rat dan perangkat desa dengan cara pendampingan penggunaan internet desa;
3. Kebutuhan informasi mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat surat-menyurat oleh warga Desa Kiarasari dengan cara menyediakan fitur/menu berita dan informasi pada sistem informasi yang dibangun;
 4. Kebutuhan fasilitas untuk mempermudah dalam surat menyurat, pendataan warga, serta pengarsipan oleh perangkat RT dan RW dan Desa;
 5. Kebutuhan informasi/sosialisasi mengenai kependudukan dengan memberikan penyuluhan sosialisasi oleh bidang ilmu komunikasi tentang materi kependudukan.

Tata Kelola yang Komperhensif

Kebijakan yang dibuat perlu menjamin prinsip tata kelola komperhensif pada penggunaan data hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah perlindungan data, bagaimana perlindungan data pribadi, data publik dan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan publik. Tata kelola komperhensif juga perlu dijamin pada tata kelola infrastruktur data, hal ini terutama penting untuk memastikan keamanan *cyber* dan informasi, dengan demikian perkembangan dan penggunaan keempat teknologi ini dapat berjalan secara aman dan bertanggungjawab. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain tata kelola yang komperhensif dengan memastikan perlindungan data menjadi prinsip utama, karena data-data yang muncul mempunyai peluang untuk memberikan sebuah petunjuk kebijakan tanpa pernah disadari sebelumnya (Milton, 2009).

Berdasarkan beberapa temuan di lapangan sebagai langkah dalam penerapan program yang dapat diusulkan untuk diadaptasi, antara lain dalam bentuk pengintegrasian *database* pemerintahan desa dengan kependudukan dan juga pemerintahan Desa Kiarasari perlu secara khusus membuka peluang dan mengakomodir kerjasama yang lebih luas dengan pihak ketiga, seperti *provider* internet untuk mempercepat program sistem informasi desa di Desa Kiarasari. SDM yang menangani proses program, seperti pengoperasian, pemeliharaan serta *monitoring* dan evaluasi sistem, harus memiliki

differentiating competencies demi menjaga keberlangsungan program.

Kolaboratif

Kebijakan terkait aplikasi perkembangan teknologi perlu dibuat secara kolaboratif, untuk itu keterbukaan pemerintah untuk secara rutin berdiskusi dengan praktisi, akademisi dan masyarakat sipil sangatlah penting. Perlunya keselarasan antara peraturan contohnya bagian soal perlindungan data pribadi karena kebijakan perlu dibuat secara antisipatif dan melihat ke depan dengan tata kelola antisipatif adalah tata kelola yang dibuat dengan mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat, pegiat pengguna teknologi dan juga kondisi sosial, teknologi yang terus berkembang memerlukan kebijakan yang juga terus berkembang. Kemampuan pengambilan kebijakan untuk melihat situasi dan mengidentifikasi risiko serta mitigasi risiko perlu dituangkan dalam pembuatan kebijakan yang terkait.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sejumlah hal. *Pertama*, peningkatan literasi internet sangat penting dilakukan. Perangkat desa yang terliterasi akan memudahkan pengelolaan sistem informasi desa dan *website*. *Kedua*, tata Kelola Desa yang baik dapat ditingkatkan jika literasi internet perangkat desa dan warga meningkat. Informasi lain yang didapatkan adalah Pemerintah Desa Kiarasari harus bisa lebih aktif memanfaatkan internet dalam rangka penguatan sistem informasi desa guna peningkatan literasi internet bagi perangkat Desa Kiarasari, karena peningkatan literasi bertindak sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai apa saja informasi yang harus diketahui, baik oleh masyarakat desa maupun masyarakat luar desa melalui *website* desa. Program kerja sama Pemerintah Desa Kiarasari dengan mitra peneliti yang saat ini sudah berjalan dengan baik, nantinya mampu merasakan dampak dari program inovasi yang dibuat. Secara praktik, memang untuk membuat perubahan sosial di desa membutuhkan proses yang panjang, karena tidak semua masyarakat bisa langsung mengadopsi inovasi yang dibuat. Walaupun sebetulnya masyarakat

di desa sudah menggunakan internet untuk kegiatan sehari-hari mereka, menggunakan internet untuk keperluan interaksi dengan orang lain, namun untuk menambahnya pengetahuan literasi internet bagi aparat dan perangkat desa perlunya didukung *skill* yang memadai dalam menggunakan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim, A. (2014). *Perubahan sosial sketsa dan refleksi metodologi kasus Indonesia*: Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Alias, N. A. (2013). *ICT Development for Social and Rural Connectedness*. New York: Springer.
- Ayu, V., & Nada. (2022). Hubungan Penggunaan Media Sosial Instagram @rilliv dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Kesehatan Mental Followers. *Coverage: Journal of Strategic Communication*, 12(2), 85-97.
- Creeber, G., & Martin, R. (2009). *Digital Cultures: Understanding New Media*. Berkshire England: Open University Press
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, D. A. (2018). *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG).
- Schmidt, E., & Cohen, J. (2014). *The New Digital Age*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Saraswati, H. D., & Afifi, S. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19. *Coverage: Journal of Strategic Communication*. 12(2), 138-155.
- Nanang, M. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa* McQuail, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Wada, N., & Nakata, T. (2015). *Menyingkap realitas lapangan meta-fasilitasi bagi pekerja pembangunan masyarakat*. Makassar, Sulawesi Selatan. COMMIT foundation.
- Sztompka, P. (2012). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sugeng, P. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Chambers, R. (1996). *PRA Memahami Desa secara Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit kanisius
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dila, S. (2007). *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Zubaedi. (2014). *Pengembangan masyarakat wacana dan praktik*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Faisal, A. A. (2014). "Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros". *Skripsi Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara*. Tanggal Akses 10 Juni 2017. Tidak Dipublikasikan. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8825/SKRIPSI.pdf?sequence=1>
- Putra, R. D., Alkatiri, J., Rosit, M., & Dewandana, D. K. (2018). Internet,

Desa dan Pembangunan (Studi
Penggunaan Internet di Desa Kiarasari
Kecamatan Sukajaya Kabupaten
Bogor). *Laporan penelitian Fakultas
Ilmu Komunikasi universitas Pancasila.*

Undang Undang Republik Indonesia no 6
tentang Desa tahun 2014.

Iriantara, Y.(2009). *Literasi media*. Jakarta:
Prenada media Kencana.

Yuliana, H. B. & Fitriati, D. (2018). Sistem
Informasi Administrasi Dan
Kependudukan Studi Kasus: Rw 03
Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat.
Seminar Nasional Teknologi Informasi.
Universitas Ibn Khaldun Bogor, p-ISSN:
2671-7740, e-ISSN: 2671 3206.